

BAB I

PENDAHULUAN

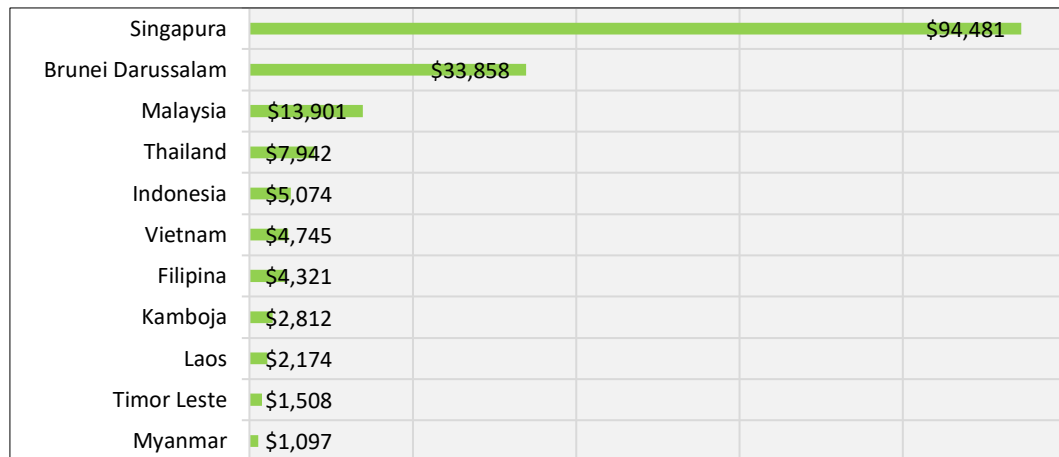
1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks kebijakan publik, berbagai keputusan pemerintah kerap memicu penolakan dari masyarakat (Anggara, 2018). Penelitian ini secara khusus membahas isu penolakan mahasiswa terhadap kebijakan penghematan atau *austerity*. Di Indonesia, fokus diarahkan pada kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, di Malaysia penelitian ini menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran subsidi bensin RON95 dan perluasan *Sales and Service Tax* (SST).

Alasan munculnya kebijakan *austerity* di Indonesia berdasarkan penelusuran dari berbagai literatur, salah satunya berkaitan dengan warisan utang dari pemerintahan sebelumnya yang jatuh tempo dan menyebabkan kas negara mengalami minus sebesar Rp 609,7 triliun. Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu implikasinya adalah pengalihan sebagian ruang fiskal untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Sapay et al., 2025; Estherina, 2025; Syukri et al., 2025).

Di sisi lain, alasan munculnya kebijakan *austerity* di Malaysia salah satunya disebabkan oleh defisit fiskal yang tidak kunjung berbalik menjadi surplus sejak 1998 hingga tahun 2025. Selain itu, terdapat kebocoran subsidi bensin RON95 sebesar RM 8 miliar yang justru banyak dikonsumsi oleh individu kaya, bisnis dan Warga Negara Asing. Kondisi tersebut mendorong Sultan Ibrahim Iskandar untuk mendukung upaya pemerintah Malaysia dalam mengambil langkah-langkah *austerity* (Ministry of Finance Malaysia, 2025; Seraj & Loheswar, 2024).

Berdasarkan fenomena *austerity* yang telah diuraikan, penelitian ini menganalisis isu dan dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025. Selain itu, penggunaan desain studi komparatif di kedua negara didasarkan pada adanya kesamaan pola penolakan terhadap kebijakan *austerity* (Nugroho & Supriatma, 2025; Anand, 2025).



Gambar 1.1. Perbandingan PDB Per Kapita Indonesia dengan Negara di Asia Tenggara. (IMF, 2025)

Perbedaan dalam kapasitas ekonomi antara Indonesia dan Malaysia penting untuk diperhatikan. Dalam konteks PDB per Kapita, sebagaimana ditunjukkan pada **Gambar 1.1.** berdasarkan laporan dari IMF pada tahun 2025, posisi PDB per kapita Malaysia dua tingkat di atas Indonesia. Perbedaan ini menjadi dasar perbandingan yang relevan karena memungkinkan penulis menganalisis dan membandingkan bagaimana kebijakan *austerity* ditolak dalam konteks sosial yang berbeda, termasuk di kalangan mahasiswa yang latar sosial ekonominya tidak sama.

Lebih jauh lagi, penelitian ini memandang perlu dilakukan studi dokumen terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Indonesia dan Budget Speech 2025 di Malaysia. Kedua dokumen tersebut merupakan pijakan utama bagi masing-masing negara dalam menerapkan kebijakan *austerity* pada tahun 2025. Di samping itu, penelitian Bailey & Shibata (2019) menunjukkan bahwa karakteristik kebijakan

austerity di negara yang berbeda cenderung menghasilkan isu dan dampak penolakan yang juga berbeda. Untuk memberi gambaran awal mengenai karakteristik kebijakan *austerity* di Indonesia dan Malaysia, penulis menyajikan ringkasan dalam **Tabel 1.1.**

Tabel 1.1. Gambaran Umum Karakteristik Kebijakan *Austerity* di Indonesia dan Malaysia Pada Tahun 2025. (Sumber: Diolah penulis, 2025)

No.	Dimensi	Karakteristik Kebijakan <i>Austerity</i> di Indonesia	Karakteristik Kebijakan <i>Austerity</i> di Malaysia
1.	Tujuan Kebijakan <i>Austerity</i>	Mengefisiensikan belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Target efisiensi mencapai Rp 306,69 triliun, terdiri dari efisiensi belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,59 triliun (Lubadah, 2025).	Mengalokasikan total anggaran sebesar RM 421 miliar dengan mendorong pengurangan defisit fiskal menjadi 3,8% dari PDB pada tahun 2025, merevitalisasi perekonomian, dan menyejahterakan rakyat (ClearTax, 2024).
2.	Fokus <i>Austerity</i>	Efisiensi anggaran belanja operasional dan non-operasional untuk Kementerian/Lembaga. Untuk pemerintah daerah, fokus pada pembatasan belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/FGD, serta pengurangan belanja perjalanan dinas sebesar 50% (Lubadah, 2025).	Konsolidasi fiskal melalui penargetan subsidi bensin RON95 hanya diperuntukkan bagi 85% golongan pendapatan serta memperluas sekaligus meningkatkan Pajak Penjualan dan Jasa (SST) (ClearTax, 2024).

Merujuk **Tabel 1.1.**, kebijakan efisiensi anggaran di Indonesia berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 memicu penolakan masyarakat sipil yang bertajuk “Indonesia Gelap”. Dalam gerakan ini, salah satu elemen penolak yang cukup menonjol adalah kelompok mahasiswa yang menentang pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan (Nugroho & Supriatma, 2025).

Sementara itu, di Malaysia, keputusan pemerintah untuk memperluas sekaligus meningkatkan pajak penjualan dan jasa (SST) serta memangkas anggaran

subsidi bensin RON95 pada pertengahan tahun 2025 memicu penolakan dari masyarakat sipil, termasuk dari kalangan mahasiswa. Penolakan tersebut antara lain terwujud dalam demonstrasi “#Tekan” dan “Turun Anwar”. Pola ini mengindikasikan bahwa salah satu akar penolakan masyarakat sipil terhadap kebijakan (*austerity*) berkaitan dengan kekhawatiran atas dampak sosial-ekonomi yang akan ditimbulkan (GAMIS, 2025; Malaysia Kini, 2025; Anggara, 2018).

Untuk menganalisis isu penolakan tersebut, penelitian ini menggunakan teori penolakan (*refusal*) yang dikembangkan oleh Bailey dan Shibata pada tahun 2017. Teori ini mengklasifikasikan bentuk-bentuk penolakan terhadap kebijakan *austerity* ke dalam empat kategori, yaitu: (1) Resistensi Tidak Kentara (*Imperceptible Resistance*); (2) Penentangan Publik Tidak Mengganggu (*Non Disruptive Public Opposition*); (3) Penentangan Publik Mengganggu (*Disruptive Public Opposition*); (4) Penolakan Militan (*Militant Refusal*). Unsur-unsur penolakan yang dianalisis meliputi: (1) kritik kultural dan/atau simbolis; (2) demonstrasi berskala kecil yang tidak sampai mengganggu lalu lintas publik; (3) demonstrasi berskala besar yang sampai mengganggu lalu lintas publik; (4) demonstrasi yang bersifat agresif, seperti aksi vandalisme maupun bentuk kekerasan lainnya (Bailey & Shibata, 2019).

Lebih lanjut, penelitian dari Bailey dan Shibata (2019) mengenai penolakan terhadap kebijakan *austerity* belum banyak dimanfaatkan dalam konteks negara berkembang. Hal ini dapat dilihat, yang dimulai dari studi Blyth (2016) yang menganalisis penerapan kebijakan *austerity* di Eropa pascakrisis finansial 2008. Blyth berfokus pada dampak makroekonomi dari kebijakan *austerity* tanpa menganalisis isu dan dampak penolakan yang muncul. Demikian pula, Farnsworth dan Irving (2024) mengkaji dampak kebijakan *austerity* terhadap kebijakan sosial

di negara-negara anggota G7. Namun, penelitian mereka lebih menyoroti konsekuensi sosial *austerity* daripada memetakan isu dan dampak penolakannya.

Dalam konteks Asia Tenggara, Amelia et al. (2025) membandingkan kebijakan *austerity* Indonesia dan Malaysia serta mengevaluasi dampak fiskal dan rekomendasi kebijakan progresif di Indonesia, seperti reformasi pajak dan investasi pada UMKM. Meski demikian, penelitian tersebut tidak mengulas isu dan dampak penolakan terhadap *austerity*. Sementara itu, Doraisami (2014) menganalisis penerapan *austerity* di Asia Tenggara dengan studi kasus Indonesia, Malaysia, dan Thailand, tetapi fokus utama penelitiannya terletak pada implementasi kebijakan, bukan pada isu dan dampak penolakan yang muncul.

Berdasarkan teori penolakan terhadap kebijakan *austerity* dari Bailey dan Shibata (2019) serta peta penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penelitian ini mengidentifikasi adanya kekosongan kajian mengenai isu dan dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di negara berkembang, khususnya Indonesia dan Malaysia. Selama ini, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada konteks negara maju serta pada dimensi penerapan dan dampak kebijakan, bukan pada isu dan dampak penolakannya.

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menganalisis kebijakan *austerity* dari perspektif penerapan dan dampak dari kebijakan tersebut. Hingga sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik memusatkan perhatian pada isu dan dampak penolakan mahasiswa yang muncul di Indonesia dan Malaysia terhadap kebijakan *austerity*.

Sebagai tambahan, terdapat perbedaan penting antara penelitian ini dengan rujukan utama dari Bailey dan Shibata (2019). Penelitian ini berfokus pada Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 2025 di Indonesia dan Budget Speech 2025 di Malaysia, sehingga menawarkan konteks yang khas dalam memahami isu dan dampak penolakan terhadap kebijakan *austerity* di negara berkembang dengan bertumpu pada analisis dokumen kebijakan terbaru. Di sisi lain, meskipun Bailey dan Shibata (2019) telah menganalisis isu dan dampak penolakan terhadap kebijakan *austerity* di Inggris dan Jepang pada periode 2010-2015, kajian mereka belum menyoroti secara khusus bentuk-bentuk penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Dengan demikian, penulisan skripsi ini memiliki urgensi untuk mengidentifikasi isu dan dampak penolakan mahasiswanya yang dimulai dari: (1) akar kebijakan *austerity* yang ditolak mahasiswa; (2) jenis kebijakan *austerity* yang ditolak mahasiswa; (3) aksi penolakan mahasiswanya; (4) bentuk-bentuk penolakan mahasiswanya; (5) dan dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan desain studi komparatif di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana berbagai bentuk penolakan mahasiswa dapat berdampak dalam menggagalkan penerapan, merevisi kebijakan *austerity*, ataupun belum berdampak sama sekali.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu membahas topik ini secara lebih mendalam, mengingat relevansi dan urgensinya terhadap permasalahan yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, skripsi ini diberi judul **“ANALISIS KOMPARASI INDONESIA-MALAYSIA DALAM DAMPAK PENOLAKAN MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN AUSTERITY”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait topik penelitian. Selanjutnya, untuk mendukung analisis tersebut, BAB II akan menguraikan

landasan teori mengenai ekonomi politik, *austerity*, penolakan (*refusal*), serta penelitian terdahulu yang relevan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana isu penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025?
2. Bagaimana dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui isu penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025.
2. Untuk mengetahui dampak penolakan mahasiswa terhadap kebijakan *austerity* di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2025.

1.4. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih konsisten dan mengerucut sesuai dengan judul penelitian ini, maka peneliti hanya menggunakan objek penelitian yang terdiri dari: (1) Mahasiswa di Indonesia yang menjadi insiator/mobilisator aksi penolakan terhadap *austerity* yang teridentifikasi dalam demonstrasi #IndonesiaGelap, yaitu BEM SI Kerakyatan dan Rakyat Bangkit; (2) Mahasiswa di Indonesia yang ikut/mengamati langsung aksi penolakan terhadap *austerity* tersebut; (3) Mahasiswa di Malaysia yang menjadi inisiator/mobilisator aksi penolakan terhadap *austerity* yang teridentifikasi dalam demonstrasi #Tekan dan #TurunAnwar; (4)

Mahasiswa di Malaysia yang ikut/mengamati langsung aksi penolakan terhadap *austerity* tersebut; (5) Pakar, analis, atau peneliti Independen dari Indonesia yang memahami betul terkait kebijakan *austerity* di Indonesia pada tahun 2025; (6) Pakar, analis, atau peneliti Independen dari Malaysia yang memahami betul terkait kebijakan *austerity* di Malaysia pada tahun 2025.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan ekonomi serta para mahasiswa di Indonesia, khususnya terkait strategi *austerity* di Malaysia serta bentuk penolakan mahasiswa di Malaysia terhadap kebijakan tersebut.

b. Manfaat Secara Teoritis

Diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan topik kajian ekonomi politik. Diharapkan juga dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang mengangkat topik serupa.